

Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Era Kepemimpinan Joko Widodo Periode 2019-2024

Muhammad Umar Assyuja^{1*}, Arif Zainudin², Akhmad Habibullah³

^{1,2,3}, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Corresponding Author's e-mail: umarassyuja@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 690-709

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2519>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2519>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan, kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian ilmiah serta tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik. Data penelitian berasal dari artikel ilmiah Scopus yang terbit pada rentang tahun 2020–2025 dan dianalisis menggunakan software Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan publikasi ilmiah pascapandemi COVID-19 dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, dan kepemimpinan nasional. Analisis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, serta perlindungan sosial. Secara substantif, kesejahteraan masyarakat relatif stabil sebelum pandemi, mengalami tekanan saat pandemi, dan menunjukkan pemulihan bertahap pada periode pascapandemi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan kesejahteraan yang adaptif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keywords : Kesejahteraan Masyarakat, Kepemimpinan, Indonesia

Abstrak : Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan, kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian ilmiah serta tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik. Data penelitian berasal dari artikel ilmiah Scopus yang terbit pada rentang tahun 2020–2025 dan dianalisis menggunakan software Biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan publikasi ilmiah pascapandemi COVID-19 dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, dan kepemimpinan nasional. Analisis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, serta perlindungan sosial. Secara substantif, kesejahteraan masyarakat relatif stabil sebelum pandemi, mengalami tekanan saat pandemi, dan menunjukkan pemulihan bertahap pada

periode pascapandemi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan kesejahteraan yang adaptif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Kepemimpinan, Indonesia

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan, kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek diantaranya, aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan perlindungan sosial. Penelitian menunjukkan aspek kesehatan merupakan salah satu pilar kesejahteraan, tidak hanya hak asasi tetapi juga produktivitas dan partisipasi masyarakat (Irfan & Kusri, 2024). Tingkat kesehatan dapat diukur berdasarkan angka harapan hidup, insiden penyakit, dan kualitas perawatan medis yang tersedia (Armansyah *et al.*, 2024)

Perekonomian juga merupakan fondasi utama dari kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga memperkuat integrasi sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan perbaikan terhadap akses pelayanan dasar (Candra *et al.*, 2024). Kesejahteraan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada konsumsi dan kualitas hidup masyarakat. Investasi pada sektor-sektor kritis, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan, adalah jalan utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan IPM (Fatimah & Priyono, 2020).

Selain aspek kesehatan dan ekonomi, pendidikan juga menjadi aspek penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kesejahteraan berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara umum (Khalik & Arifin, 2023; Pririzki *et al.*, 2023). Pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Sebagaimana yang dikatakan Akbar *et al.*, (2023), harus diarahkan pada peningkatan kesempatan bagi masyarakat, menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan berkualitas.

Aspek perlindungan sosial juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap layanan dasar. Program-program pemerintah yang mendukung perlindungan sosial, seperti dana desa, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Sebuah penelitian yang mengevaluasi efektivitas dana desa menunjukkan bahwa pengalokasian dana ini dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Tingkat kemiskinan pun menjadi salah satu indikator dalam mencerminkan proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan (Khalik & Arifin, 2023).

Seperti teori Utilitarianisme Klasik, teori ini melihat kesejahteraan sebagai maksimum utilitas atau kebahagiaan. Konsep ini berfokus pada distribusi manfaat secara merata di seluruh masyarakat dengan tujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif. Jeremy Bentham dan John

Stuart Mill adalah tokoh penting dalam menegaskan bahwa tindakan dianggap benar jika dapat meningkatkan kebahagiaan bagi banyak orang. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjalankan perekonomian, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk pencapaian kesejahteraan sosial (Indra et al., 2022).

Pada periode kedua masa kepemimpinan Joko Widodo antara tahun 2019 hingga 2024 mencerminkan banyak dinamika sosial ekonomi akibat kebijakan pembangunan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Era ini diawali dengan visi untuk meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, yang merupakan prioritas utama dalam agenda pemerintahan Jokowi.

Banyak artikel yang membahas tentang kesejahteraan masyarakat namun secara terpisah dan hanya fokus pada sektor tertentu. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada kepemimpinan Jokowi di periode 2019 – 2024 melalui kacamata kajian literatur terdahulu yang menjadi pentingnya dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

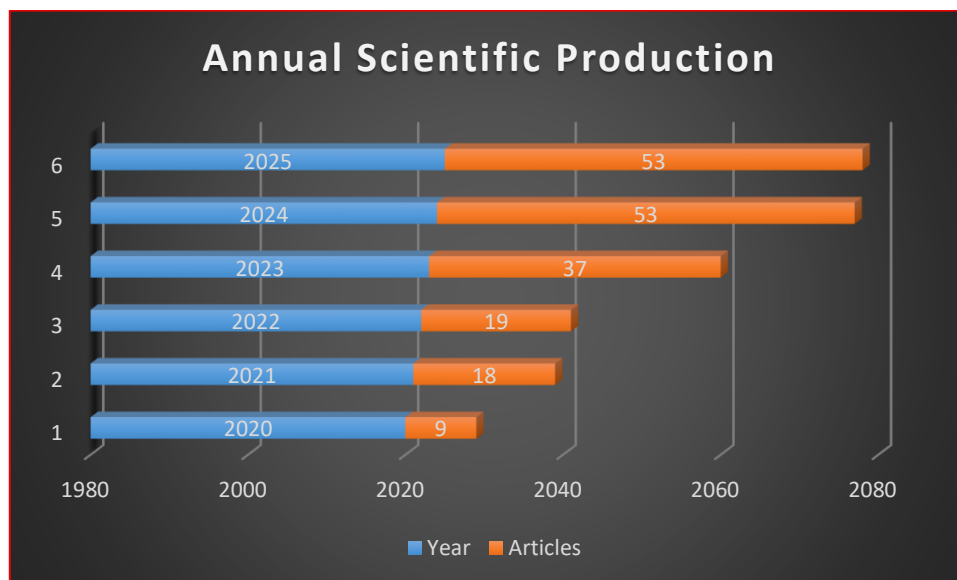
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dirancang untuk menggali makna dari perilaku, interaksi, dan persepsi individu yang terlibat dalam penelitian, dengan menggunakan data deskriptif yang dapat berupa kata-kata lisan atau tulisan (Aulia & Hermansah, 2023). Dengan sistem literature review (*Systematic literature review*) untuk pengkajian lebih dalam mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di era kepemimpinan Jokowi periode 2019 - 2024. Metodologi *systematic literature review* merupakan pendekatan yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mensintesis penelitian yang relevan dengan cara yang sistematis dan efisien. (Jannani et al., 2024).

Collection Data, Pengumpulan data pada artikel ini menggunakan data sekunder dengan kajian literature review yang dimana data dari penelitian terdahulu dikumpulkan melalui Scopus sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, dalam pengumpulan data yang dikumpulkan merupakan data yang relevan dengan *keyword* (*jokowi, social welfare, well being, public policy, governance, Indonesia, social protection, economic welfare, poverty reduction, public health, education*) data yang digunakan merupakan data dari tahun 2020 – 2025. Setelah pencarian data pada Scopus ditemukan sebanyak 1.005 artikel yang berhubungan dengan kata kunci yang ada, namun data tersebut dipilah kembali agar sesuai dengan topik penelitian. Setelah melakukan penyaringan terapat 189 artikel yang relevan dengan penelitian ini, data inilah yang akan digunakan untuk proses analisis.

Analisis Data, Teknik analisis bibliometrix menjadi teknik utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tingkat kesejahteraan di era kepemimpinan Joko Widodo. Analisis bibliometrik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi literatur ilmiah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dalam penulisan artikel ilmiah, analisis bibliometrik menawarkan pemahaman mendalam tentang perkembangan pengetahuan dan tren dalam bidang tertentu melalui parameter-parameter seperti jumlah publikasi, subjek artikel, serta produktivitas penulis (Rachmawati & Suparman, 2023). Proses analisis data dibantu dengan *software* Biblioshiny untuk memudahkan impor data dari scopus dan memvisualisasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Publikasi Topik Kesejahteraan Masyarakat di Era Jokowi 2019-2024



Gambar 1. Annual Scientific Production, Source; Rstudio 2025

Gambar menunjukkan perkembangan jumlah publikasi ilmiah yang membahas topik kesejahteraan masyarakat Indonesia di era Jokowi dari tahun 2020-2025. Publikasi ilmiah yang ada memperlihatkan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini menandakan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kepemimpinan Jokowi.

Pada tahun 2020, jumlah publikasi dalam skala internasional masih dinilai rendah dengan 9 artikel yang terpublikasi. Hal ini menunjukkan fokus penelitian masih belum sepenuhnya membahas kesejahteraan masyarakat di era Jokowi, melainkan masih terfokus pada pembahasan tersendiri seperti kesehatan dan ekonomi secara umum. Memasuki tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan jumlah publikasi menjadi 18 dan 19 artikel ilmiah yang membahas kesejahteraan masyarakat di era Jokowi. Dengan adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan perhatian terkait dampak yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek kemiskinan, pengangguran, perlindungan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Pada kurun waktu tahun ini, kesejahteraan masyarakat mulai dilihat sebagai isu multidimensional yang memerlukan pembahasan lintas sektor.

Peningkatan terlihat lebih signifikan pada tahun 2023 dengan 37 publikasi artikel yang membahas kesejahteraan masyarakat di era Jokowi, hal ini menandakan adanya perkembangan fokus penelitian dari respon krisis menjadi evaluasi kebijakan dan dampak jangka menengah pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat di era Jokowi. Pada tahun ini tidak hanya membahas dampak langsung dari pandemi, tetapi juga membahas tentang efektivitas kebijakan publik, dan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan tertinggi produksi ilmiah terjadi pada tahun 2024-2025, dengan 53 publikasi artikel pada kedua tahun tersebut. Dengan itu menunjukkan bahwa pembahasan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan di era Jokowi menjadi pembahasan yang mulai ramai dibahas. Penelitian membahas topik kesejahteraan dari berbagai aspek seperti kebijakan sosial, pembanguna manusia, ekonomi, kemiskinan dan transisi pasca pandemi COVID-19. Sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, khususnya pada kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024.

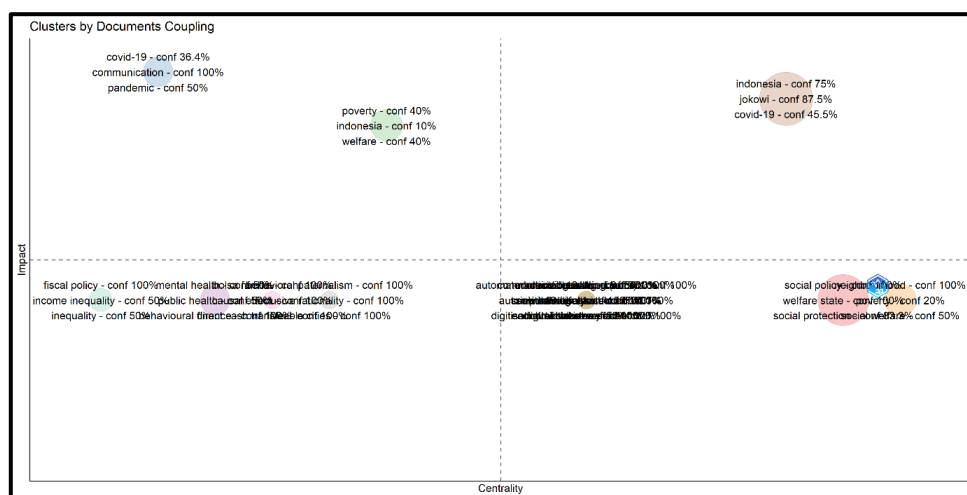
a. Pola Keterkaitan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Era Kepemimpinan Jokowi

Kluster berwarna biru merupakan kluster yang berfokus pada kesejahteraan dari sisi tingkat kemiskinan dan pengangguran, ditandai dengan kata kunci *social welfare*, *poverty*, *sustainable developmet*, *inequaly*, dan *unemployment*. Kluster ini menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan masih menjadi masalah utama dalam pembahasan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era Jokowi. Dan dengan adanya kata kunci *poverty alleviation* dan *social protection* menunjukkan bahwa penelitian banyak menyoroti tentang program perlindungan sosial dan kebijakan redistributif yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pada era Jokowi. Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan Jokowi mengenai penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan tiap daerah, dan pembangunan berkelanjutan (Hutabarat et al., 2024).

Pada kluster ungu menunjukkan peran dari kebijakan publik yang ditunjukkan dengan kata kunci *public policy*, *social policy*, *economic development*, *welfare economic*, dan *employemnt*. Kluster ini menjadi penghubung anatara aspek kepemimpinan politik dan aspek sosial ekonomi. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia dilihat dari hasil kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan sosial dan ekonomi menjadi salah satu aspek utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, kesejahteraan dapat diwujudkan melalui kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan pada pemerintahan Jokowi telah menekankan strategi pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial melalui redistribusi pendapatan, peningkatan akses kepada layanan sosial dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023b).

Kluster berwarna orange menunjukkan kata kunci *government* dan *welfare state*. Yang menandakan kluster ini membahas tentang peran negara dalam menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selama periode 2019 – 2024 kepemimpinan Jokowi sudah melakukan banyak upaya dalam penyediaan kesejahteraan sosial. Pembahasan kesejahteraan lebih banyak dibahas dari aspek program dan kebijakan dibandingkan pembahasan kesejahteraan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di era kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 masih dalam tahap menuju negara kesejahteraan.

Kesejahteraan di Era Kepemimpinan Jokowi Periode 2019-2024 Berdasarkan Tema



Source; RStudio 2025

label	group	freq	centrality	impact
social policy - conf 100% welfare state - conf 100% social protection - conf 83.3%	1	26	1,167	1
covid-19 - conf 36.4% communication - conf 100% pandemic - conf 50%	2	5	0,636	1,286
poverty - conf 40% indonesia - conf 10% welfare - conf 40%	3	6	0,901	1,143
mental health - conf 50% public health - conf 50% behavioural finance - conf 100%	4	5	0,665	1
neighbourhood - conf 100% poverty - conf 20% social welfare - conf 50%	5	6	1,229	1
indonesia - conf 75% jokowi - conf 87.5% covid-19 - conf 45.5%	6	31	1,079	1,239
bolsa familia - conf 100% causal effect - conf 100% direct cash transfer - conf 100%	7	2	0,688	1
behavioral paternalism - conf 100% inclusive rationality - conf 100% liveable cities - conf 100%	8	2	0,725	1
fiscal policy - conf 100% income inequality - conf 50% inequality - conf 50%	9	3	0,613	1
automated decision-making (adm) - conf 100% automated welfare state - conf 100% digitisation of social welfare - conf 100%	10	2	1,02	1
communication networks - conf 100% covid-19 disaster - conf 100% digital culture - conf 100%	11	2	1,02	1
machine learning - conf 100% sentiment analysis - conf 66.7% twitter - conf 50%	12	2	1,02	1
mental health - conf 50% public health - conf 50% adult social care - conf 100%	13	2	1,02	1
economic growth - conf 33.3% inflation - conf 100% investment - conf 100%	14	2	1,02	1
covid-19 - conf 9.1% crisis management - conf 100% economic recovery - conf 100%	15	2	1,02	1

Source; Rstudio 2025

Hasil visualiasasi dari clustering by coupling terdapat 15 cluster yang terbagi di beberapa kuadran diantara garis impact dan centrality. Impact menunjukkan bahwa dampak atau pengaruh dari sebuah penelitian, yang diukur melalui metrik seperti jumlah sitasi yang diterima oleh

publikasi tertentu (Song et al., 2022). Sedangkan centrality merupakan ukuran penting dalam analisis jaringan yang menunjukkan peran dan posisi dalam jaringan penelitian. Node yang tinggi sering kali merupakan kunci dari hubungan antar peneliti (Wang et al., 2025). Pada intinya impact menunjukkan seberapa berpengaruh tema terhadap pembahasan dan centrality menunjukkan peran dari tema tersebut.

Pada kluster 1 menunjukkan tema yang berfokus pada *social policy, welfare state, dan social protection*. Dengan angka centrality yang cukup tinggi menunjukkan bahwa tema ini berperan dalam penelitian tentang kesejahteraan masyarakat. Kluster ini memperlihatkan pembahasan yang dimana negara ditempatkan sebagai aktor utama dalam penyedia kesejahteraan melalui kebijakan sosial dan perlindungan sosial. Pada era Jokowi kebijakan bantuan sosial dan perlindungan sosial sudah diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti kebijakan PKH dan KUR yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial dan melatih keterampilan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Mohd Kassim et al., 2025).

Kluster 2 dan kluster 15 merupakan kluster yang menyoroti tema *pandemic, communication, crisis management dan economic recovery*. Yang menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat juga dinilai dan dipahami dari aspek komunikasi pemerintah dan manajemen krisis dalam menghadapi pandemi. Dalam kluster ini menekankan pentingnya penyampaian informasi, kepercayaan publik, dan kebijakan untuk pemulihan pasca pandemi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi, pemerintahan Jokowi menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi publik dengan tujuan untuk memberitahu dan mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan selama pandemi. Komunikasi dari pemerintah ini dijalin untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mematuhi kebijakan yang ada (Amin et al., 2023).

Pada kluster 3 dan kluster 5 membahas tema *poverty, social welfare, indonesia, dan neighbourhood*. Kluster ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Adapaun lingkungan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur pada era Jokowi yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil yang seringkali rentan terhadap kemiskinan (Syukri, 2023). Dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat serta mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat daerah.

Aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat ditunjukkan dalam kluster 4 dan kluster 13, yang berfokus pada tema *mental health, public health, behavioural finance dan social care*. Kluster ini menunjukkan pembahasan kesejahteraan dari aspek kesehatan dan tekanan ekonomi pada saat pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan perhatian pemerintah terhadap kesehatan mental, layanan sosial serta layanan kesehatan, yang menandakan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui aspek kesehatan fisik, psikologis, dan kondisi sosial masyarakat. Tekanan ekonomi pun menjadi permasalahan saat pandemi karena perekonomian yang turun secara signifikan menyebabkan kondisi mental dan sosial masyarakat terganggu. Selama periode kepemimpinan Jokowi, kesehatan fisik dan mental merupakan prioritas dalam kesehatan publik, peran dari media dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental semakin ditingkatkan, terutama akibat berkembangnya kecemasan ekonomi (Pujiastuti & Anshori, 2022)

Kluster 6 menjadi kluster yang paling dominan, ditunjukkan dengan kata kunci *Indonesia, Jokowi, dan COVID-19*. Frekuensi pada kluster ini merupakan yang tertinggi diantara seluruh

kluster, hal tersebut menunjukkan kebanyakan literatur membahas kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi dan krisis pandemi. Kesejahteraan dilihat sebagai hasil dari bagaimana pemerintah dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan serta kesiapan menghadapi tantangan yang tidak terduga, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pun menjadi suatu tantangan yang harus pemerintah lakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu menandakan bahwa kepemimpinan Jokowi dinilai dari kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti PSBB dan vaksinasi merupakan suatu bentuk kesiapan pemerintah Jokowi dalam merespon krisis pandemi (Sarjito, 2022; Ghofilah, 2021)

Pada kluster 7 menunjukkan topik pembahasan seperti *bolsa familia*, *causal effect*, *direct cash transfer* pada kluster ini membahas tentang program bantuan tunai yang ada di negara Brasil, hal ini menunjukkan adanya perbandingan antara program bantuan tunai dari Brasil dengan negara Indonesia. Bolsa Familia merupakan program bantuan finansial di negara Brasil yang diawali pada tahun 2004 sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui program transfer tunai bersyarat, bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, dengan memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mengikuti pemeriksaan kesehatan (Falcão et al., 2025). Hal ini serupa dengan program BLT periode Jokowi yang ada di Indonesia, merupakan program bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan meningkatkan perekonomian masyarakat. (Fastabiqul Khairat, 2023). Pada intinya kedua program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan secara finansial.

Pada kluster 8 menunjukkan tema dan topik pembahasan *behavioral paternalism*, *inclusive rationality*, dan *liveable cities*. Kluster ini menunjukkan tema partisipasi masyarakat dan perencanaan kota sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan di era kepemimpinan Jokowi telah dilakukan upaya untuk mengintegrasikan perencanaan kota berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Salah satu program Jokowi adalah 100 Smart Cities, di mana pemerintah berupaya mengintegrasikan kualitas hidup masyarakat serta efisiensi dalam layanan publik. Pendekatan kebijakan publik pada kepemimpinan Jokowi pun berfokus pada partisipasi masyarakat sebagai peran penting dari proses perencanaan hingga implementasi kebijakan. Dalam berbagai kebijakan, pemerintah mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan guna memastikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat terpenuhi dengan baik (Dwipayanti et al., 2021; Masduki, 2021)

Kluster 9 serta kluster 14 menunjukkan pembahasan tema dari aspek ekonomi dan ketimpangan dengan kata kunci *fiscal policy*, *income inequality*, *economic growth*, *inflation*, dan *investment*. Pada kedua kluster ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan perkembangan perekonomian menjadi bagian dari kesejahteraan melalui stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi di era Jokowi dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Seperti kebijakan pajak yang difokuskan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat, inflasi dan investasi pun menjadi salah satu faktor terciptanya kesejahteraan masyarakat (Prasetyo & Setyadharma, 2022; Aisyah et al., 2023)

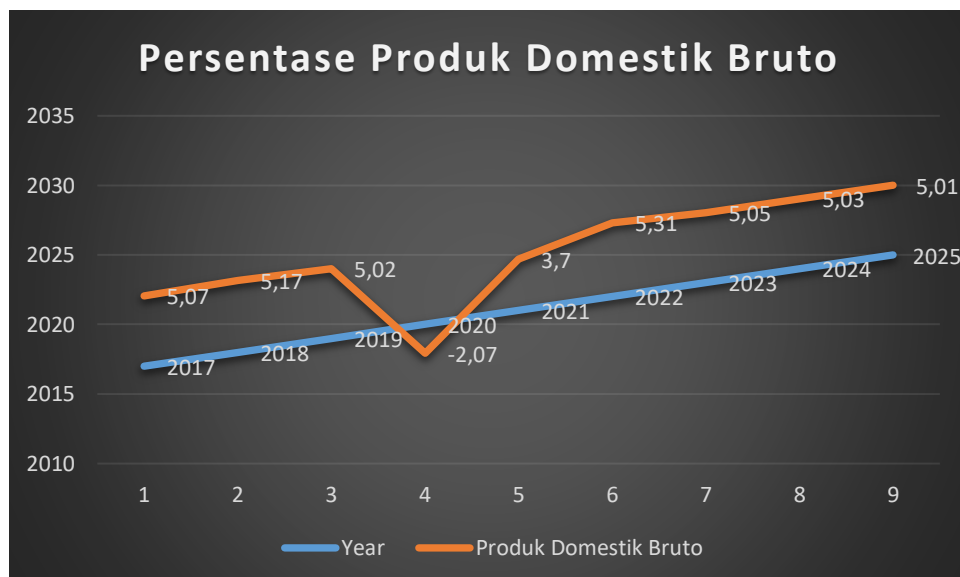
Pada kluster 10, kluster 11, dan kluster 12, menunjukkan tema terkait transformasi digital dan penggunaan teknologi informasi dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata kunci *autoamated decision-making*, *automated welfare state*, *communication network*, *digital culture* dan *machine learning*, menunjukkan terkait jaringan komunikasi, digitalisasi, dan sistem otomatis dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kebijakan sosial. Dengan adanya kata kunci *sentiment analysis* dan *twitter* menunjukkan

pemanfaatan media sosial untuk memahami opini publik terhadap kebijakan kesejahteraan. Pada era Jokowi, khususnya pada saat pandemi pemerintahan sudah menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi serta mengedukasi masyarakat untuk membangun citra dan membangun kepercayaan masyarakat (Ningrum, 2020). Namun, terdapat beberapa tantangan dalam proses digitalisasi karena adanya masyarakat yang kurang literasi digital atau keterbatasan akses internet. Hal ini dapat menyebabkan ketidak merataannya informasi serta menghambat efektivitas komunikasi dalam menjangkau seluruh masyarakat (Bambang Heru Purwanto, 2023).

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Era Kepemimpinan Jokowi Periode 2019-2024

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari sebuah pemerintahan, kesejahteraan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dinilai secara multidimensional yang mencakup beberapa aspek diantaranya, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Aspek itulah yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan untuk memenuhi standar kesejahteraan masyarakat, jika seluruh aspek tersebut terpenuhi barulah negara tersebut dapat disebut dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019 – 2024 sudah berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai *welfare state*.

Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari aspek ekonomi, perekonomian suatu negara biasanya dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB), karena PDB menunjukkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara, mulai dari total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara dan perpajakan.

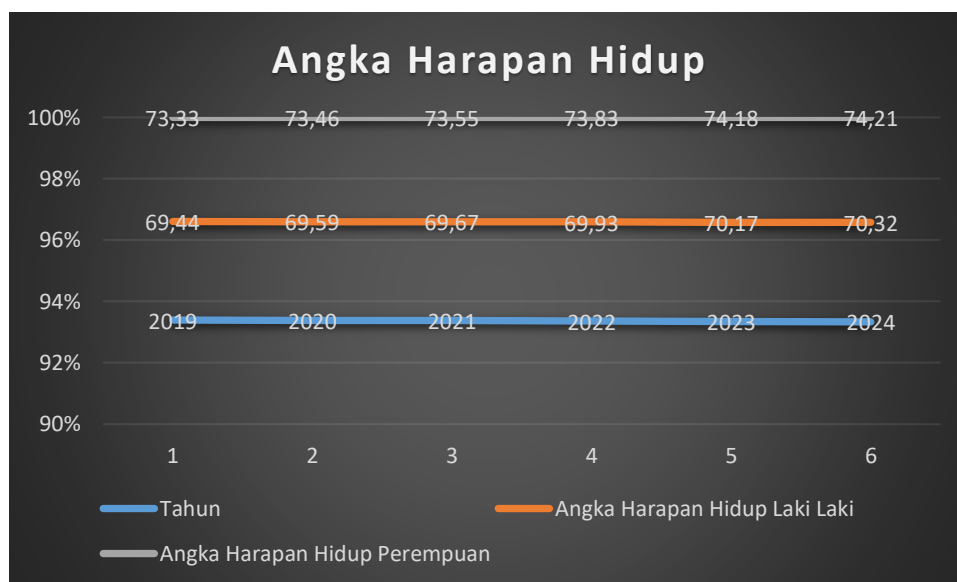


Source; <https://www.bps.go.id/id>

Dari grafik diatas menunjukkan sebelum pandemi COVID-19 pada awal era kepemimpinan Jokowi, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat meningkat dari tahun 2017 berada pada angka 5,07% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 5,17%, sampai akhirnya pada tahun 2019 mulai terjadi penurunan menjadi 5,02%, dan pada tahun 2020 perekonomian mengalami penurunan drastis sampai terjadi minus pada angka -2,07% akibat dampak dari pandemi, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja serta meningkatnya angka kemiskinan dan

pengangguran. Upaya pemulihan dilakukan untuk stabilisasi ekonomi melalui program National Economic Recovery (PEN) di mana program tersebut berkontribusi pada pertumbuhan PDB di tahun 2021 dan 2022 (Nugroho & Maretianiandini, 2023). UMKM di Indonesia menjadi fokus kebijakan pemerintah karena peranannya yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dari penelitian UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menyediakan 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Yadewani & Duraipandi, 2024). Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah memberikan program pendanaan serta dukungan melalui e-commerce. Hal ini membantu UMKM untuk bertahan dan memperlambat ekonomi global akibat pandemi (Syarif Mutsanna, 2024). Setelah adanya upaya upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi, angka PDB pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif dengan angka 3,70%, dan pada tahun 2022 perekonomian di Indonesia mulai stabil yang di mana angka PDB mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,31% pada tahun berikutnya angka PDB mengalami penurunan kembali menjadi 5,05% dan pada akhir periode kepemimpinan Jokowi angka PDB tahun 2024 menunjukkan angka 5,03%. Hal ini menunjukkan kembalinya kestabilan perekonomian di Indonesia pasca pandemi, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintahan di era Jokowi untuk meningkatkan perekonomian dari sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi.

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan pada aspek kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup menjadi indikator yang penting dari peningkatan kualitas pelayanan hidup masyarakat. Aspek kesehatan pun dinilai dari bagaimana cara pemerintah mengedepankan inklusifitas dalam pemberian layanan kesehatan. Hal ini penting, terlihat pada kelompok masyarakat rentan seperti lansia, di mana kualitas hidup mereka sering kali diukur berdasarkan kondisi kesehatan fisik dan mental yang kurang baik (Lutfiah & Sugiharto, 2021).



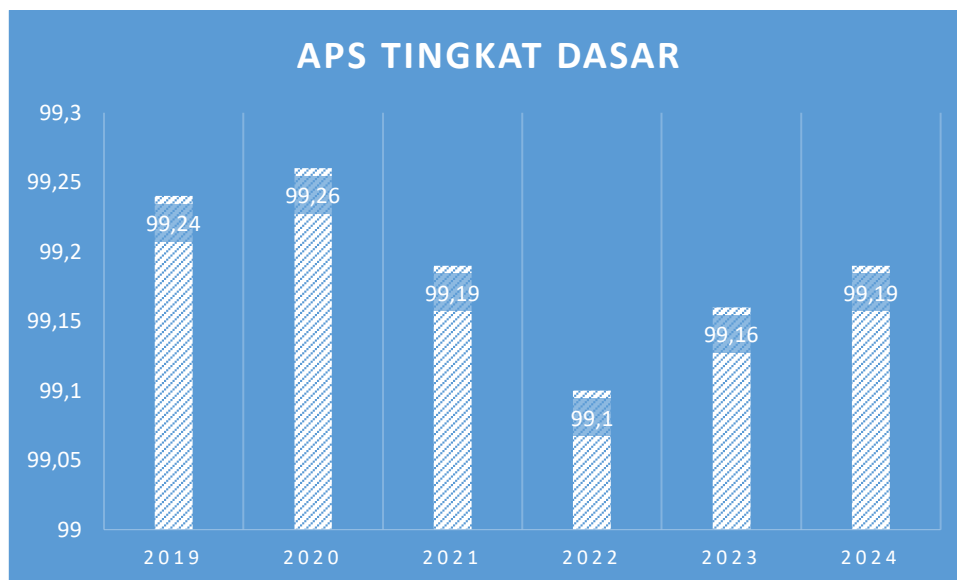
Source: <https://www.bps.go.id/id>

Dari gambar diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup Laki Laki dan Perempuan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Dapat dilihat bahwa angka harapan hidup laki laki pada awal kepemimpinan Jokowi berada pada angka 69,44% dan perempuan berada diangka 73,33%, kemudian pada tahun 2020 saat awal terjadi pandemi laki laki berada pada angka

69,59% dan perempuan 73,46%, dari angka ini membuktikan dengan adanya krisis pandemi, angka harapan hidup masih meningkat secara perlahan. Dan pada tahun 2021 angka harapan hidup laki laki berada pada angka 69,67 dan perempuan 73,55%, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan angka harapan hidup laki laki menunjukkan angka 69,93% dan perempuan sebesar 73,83%, peningkatan secara perlahan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan mulai terbentuk. Pada tahun 2023 angka harapan hidup laki laki dan perempuan meningkat pada angka 70,17% untuk laki laki dan 74,18% untuk perempuan, dan pada akhir periode Jokowi angka harapan hidup laki laki dan perempuan mengalami peningkatan lagi pada angka 70,32% dan 74,21%. Dengan peningkatan angka harapan hidup menunjukkan kepedulian pemerintah Jokowi dalam melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat dari segala umur. Adapun tantangan seperti layanan kesehatan yang belum tersedia di daerah daerah terpencil yang menjadi tantangan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan (Nurkholifah et al., 2021).

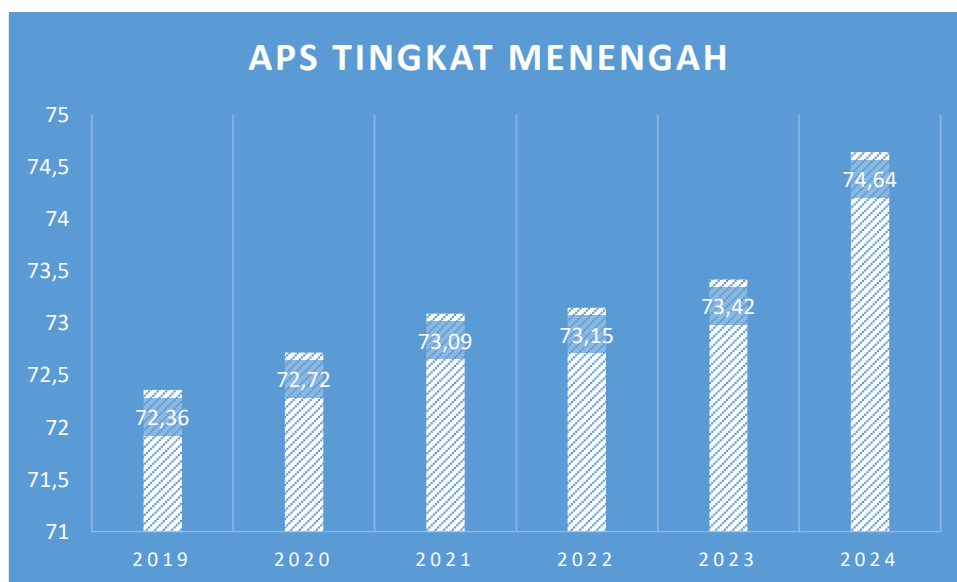
Di sisi lain dampak dari pandemi COVID-19 memperburuk semua aspek kesehatan masyarakat. Seperti penurunan akses layanan kesehatan dan batalnya sejumlah program kesehatan selama masa pandemi (Yusvita et al., 2021). Pada masa pandemi program vaksinasi dijalankan untuk mempercepat pemulihan dari dampak pandemi dari aspek kesehatan. Program vaksinasi dimulai pada Januari 2021, di mana Jokowi menjadi penerima vaksin pertama sebagai bentuk dukungan dan untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi (Ghofilah, 2021). Jokowi juga melakukan relokasi anggaran secara cepat untuk mendukung penanganan pandemi, serta memberikan dukungan kepada sektor sektor yang paling terpengaruh seperti kesehatan dan ekonomi (Ramdhani & Nandiyanto, 2021). Adapun peningkatan keketatan pemeriksaan kesehatan seperti *swab test* dan kewajiban penggunaan masker saat keluar rumah guna mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kesehatan pada saat pandemi tidak hanya dari aspek kesehatan secara fisik. Namun, kesehatan mental masyarakat menjadi perhatian yang penting. Salah satu studi menunjukkan bahwa selama pandemi, terdapat penurunan kesehatan mental dari berbagai kalangan mahasiswa dan remaja secara signifikan akibat pandemi (Aloysius & Salvia, 2021). Selama periode ini, kesehatan mental pun merupakan prioritas dalam kesehatan publik, peran dari media dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental semakin ditingkatkan, terutama akibat berkembangnya kecemasan ekonomi (Pujiastuti & Anshori, 2022). Pasca pandemi tingkat kesehatan masyarakat mulai stabil dengan mulai berjalannya kembali layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, pendidikan di Indonesia sangat penting guna meningkatkan IPM dan juga pengembangan sumber daya manusia. Mulai dengan adanya penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan kualitas belajar di tingkat pendidikan dasar.



Source; <https://www.bps.go.id/id>

Tercatat pada Badan Pusat Statistik pada awal kepemimpinan Jokowi tahun 2019 angka partisipasi sekolah pada tingkat dasar sebesar 99,24% dan pada awal pandemi angka partisipasi sekolah tingkat dasar mengalami kenaikan pada angka 99,26%. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada angka partisipasi sekolah hingga 9,10%, dikarenakan efek dari adanya pandemi yang mengharuskan seluruh sekolah di Indonesia untuk menjalankan proses belajar mengajar secara online atau daring, hal tersebut menjadi tantangan dari sektor pendidikan dikarenakan perlunya adaptasi pengajar dan siswa untuk menjalankan proses belajar mengajar secara daring. Tantangan yang dihadapi dari proses belajar mengajar secara online adalah, tidak semua orang tua siswa memiliki akses untuk melakukan pembelajaran secara online, kemudian kurangnya literasi digital dari pengajar maupun siswa menghambat jalannya proses belajar mengajar. Tuntutan untuk tatap menjalankan pemberlajaran pengajar juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi dibidang teknologi dan berinovasi dalam proses mengajar (Susanto, 2022). Pada tahun 2023 pasca pandemi angka partisipasi sekolah mulai meningkat pada angka 99,16%, dan pada akhir tahun 2024 berada pada angka 99,16%, dikarenakan proses pembelajaran sudah kembali normal seperti semula. Walau angka pendidikan pada akhir periode kepemimpinan Jokowi tidak setinggi angka pada saat awal memimpin, angka tersebut masih tergolong tinggi dan masih dapat berkembang pada tahun tahun berikutnya.



Source; <https://www.bps.go.id/id>

Pada tingkat pendidikan menengah sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pada 2019 tercatat 72,36% angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah, saat terjadi awal pandemi 2020 angka partisipasi sekolah menengah masih mengalami peningkatan pada angka 72,72%, kebijakan yang diterapkan pada sektor pendidikan sama disemua tingkat, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi, di mana pembatasan tatap muka dan seluruh proses pembelajaran dialihkan menjadi online. Tantangan yang dihadapi pun cenderung sama disemua tingkat seperti, kurangnya infrastruktur teknologi, kompetensi pengajar, dan kurangnya literasi digital. Kemudian pada tahun 2021, 2022, dan 2023 angka partisipasi terus meningkat, hingga pada akhir tahun 2024 angka partisipasi sekolah menengah diangka 74,64%. Hal ini menunjukkan pada awal kepemimpinan Jokowi, sebelum pandemi, saat pandemi, hingga pasca pandemi angka partisipasi sekolah menengah mengalami peningkatan secara signifikan yang mengindikasikan upaya kesejahteraan pada sektor pendidikan mulai terwujud, namun perlu adanya evaluasi guna perkembangan pada sektor pendidikan kedepannya.

Dengan itu menunjukkan tingkat pendidikan di Indonesia mulai mendekati kata sejahtera, hal tersebut dibuktikan dengan angka partisipasi sekolah tingkat dasar yang mencapai angka 99,19% pada akhir tahun 2024, walau terjadi fluktuasi dan angka tidak kembali seperti awal, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di Indonesia yang berada ditingkat dasar mendapatkan akses pendidikan hampir menyeluruh. Sedangkan angka anak sekolah pada tingkat menengah mencapai angka 74,64% pada akhir 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan dari awal kepemimpinan Jokowi hingga akhir kepemimpinannya pada tingkat pendidikan di Indonesia. Perlu adanya pengembangan dari tenaga pengajar dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan dibidang pendidikan.

Dari aspek sosial yaitu kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 hal ini sejalan dengan visi Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan, pengurangan ketimpangan tiap daerah, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun angka kemiskinan pada tiap tahunnya menunjukkan fluktuasi.



Source; <https://www.bps.go.id/id>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi angka kemiskinan masyarakat Indonesia berada diangka 9,22%, kemudian meningkat diangka 10,19% pada tahun 2020 yang dikarenakan awal mula terjadinya pandemi yang menyebabkan kenaikan angka cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintahan Jokowi menjalankan program bantuan sosial seperti (Program Keluarga Harapan) PKH dan (Bantuan Pangan non Tunai) BPNT merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan. Namun, dalam penyalurannya masih ada kendala seperti ketidak akuratan data penerima dan keterlambatan pencairan dana yang menghambat efektivitas program tersebut (Hutabarat et al., 2024). Lalu pada tahun 2021 angka kemiskinan mulai menurun menjadi 9,71% walaupun masih cenderung tinggi dan pada tahun tahun berikutnya angka kemiskinan turun secara signifikan menjadi 8,57% pada tahun 2024 dan pada akhir tahun 2025 angka kemiskinan berada pada angka 8,47%. Program perlindungan sosial dari pemerintahan Jokowi dapat dikatakan efektif dalam memberikan dukungan finansial dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.



Source; <https://www.bps.go.id/id>

Pada saat pandemi terjadi lonjakan pengangguran yang mencapai angka tertinggi dalam satu dekade, dampak ini banyak dirasakan oleh usia muda (Rokhmawati & Aziz, 2024). Seperti gambar di atas pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi angka pengangguran cenderung rendah diangka 5,23%, kemudian pada tahun 2020 saat awal pandemi terjadi angka pengangguran langsung naik drastis pada angka 7,07% hal ini karena banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan guna tetap menjaga dan menjalankan perusahaan. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah menjalankan upaya pemerintah melalui bantuan sosial dan pengembangan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat. Program Indonesia Pintar dan Jaminan Kesehatan Nasional adalah contoh yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang (Maidah et al., 2022; Salsabila & Suhaedi, 2023). Adapun kebijakan perlindungan sosial pun diupayakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan yang diberikan untuk pelatihan keterampilan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendorong kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun ketahanan ekonomi terutama pada masyarakat yang rentan (Abdul Shukor & Kattiyapornpong, 2024; Damar et al., 2024). Dengan adanya upaya dari pemerintahan Jokowi, pada tahun 2021 sudah mulai terjadi penyesuaian dari masa pandemi sehingga terjadi penurunan angka pada 6,49%, kemudian terjadi penurunan yang signifikan pada tahun tahun berikutnya hingga tercatat pada tahun 2025 angka pengangguran terbuka berada pada angka 4,85%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini scopus digunakan sebagai sumber data yang digunakan untuk menganalisis, terdapat 189 data yang ditemukan terkait kesejahteraan masyarakat di era Jokowi periode 2019-2024. Kemudian data diolah menggunakan bantuan biblioshiny, visualisasi co-occurrence network menghasilkan 5 kluster yang saling berhubungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dikaji melalui aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial, kemiskinan dan pengangguran. Visualisasi thematic map menguatkan dengan memunculkan tema seperti tata kelola pemerintahan, kebijakan sosial, jaringan komunikasi, dan krisis manajemen menunjukkan kesejahteraan di era Jokowi dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan, serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa era kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 belum dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), melainkan masih dalam proses suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dinilai dari segi program dan kebijakan yang telah dijalankan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun tantangan dan masalah masih terlihat seperti kurang meratanya efek dari suatu kebijakan, program yang belum tepat sasaran, kebijakan yang perlu ditingkatkan kembali. Menunjukkan bahwa era kepemimpinan Jokowi 2019-2020 masih dalam proses menuju kedalam konsep negara kesejahteraan yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Kekurangan dari penelitian ini data yang digunakan untuk dianalisis terbatas pada publikasi ilmiah Scopus dan rentang waktu data yang digunakan dari tahun 2020–2025, sehingga kemungkinan terdapat kajian relevan di luar cakupan data yang tidak tercakup. Penelitian ini memberikan dampak akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam lingkup literatur mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menggabungkan analisis bibliometrik dan pembahasan kepemimpinan berdasarkan aspek kesejahteraan. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Jokowi periode

2019-2020 merupakan konsep yang multidimensional di mana kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi suatu negara dan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintahan kedepannya dalam merancang kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran.

Rekomendasi penelitian kedepannya diharapkan untuk memperluas cakupan data agar bisa membahas kesejahteraan masyarakat lebih mendalam lagi dan seiring dengan meningkatnya peran teknologi dalam kebijakan publik, penelitian ke depan dapat difokuskan pada peran digitalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti pembahasan mengenai *digital welfare state* dan sistem otomatis dalam penyaluran bantuan sosial menjadi bahasan yang menarik dan penting dipahami dalam transformasi kesejahteraan di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Arif Zainudin dan Bapak Akhmad Habibullah yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pembuatan artikel ini. Terimakasih juga kepada Jurnal SEIKAT telah menerima artikel saya untuk dipublikasikan. Harapan saya artikel ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shukor, S., & Kattiyapornpong, U. (2024). Muslim travellers: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 15(4), 1054–1077. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2022-0302>
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh hubungan antara ketimpangan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi: Sebuah perspektif dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., Barki, K., & Alamsyah. (2023). Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.95>
- Aloysius, S., & Salvia, N. (2021). Analisis kesehatan mental mahasiswa perguruan tinggi X pada awal terjangkitnya COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 83–97. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.962>
- Amin, K., Mahameruaji, J. N., Pranata, A. D., Madu, A. U., & Nurizal, H. (2023). Health-protective behavior during the pandemic: Does media exposure to COVID-19 information matter? *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(2), 164–172. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i2.50453>
- Aulia, A. R., & Hermansah, T. (2023). Peran bank sampah Tri Alam Lestari dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan. *Jurnal Kommunity Online*, 3(2), 117–144. <https://doi.org/10.15408/jko.v3i2.30916>
- Purwanto, B. H., T. B., I. S., & B. (2023). Policy implementation strategy of link and match for vocational high school with industry and the world of work in Tangerang District, Indonesia. *Tujjin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(4), 1193–1206. <https://doi.org/10.52783/tjpt.v44.i4.999>
- Candra, Y., Goejantoro, R., & Dani, A. T. R. (2024). Pengelompokan provinsi berdasarkan indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kriminalitas di Indonesia menggunakan algoritma centroid linkage. *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi*, 12(1), 9–15. <https://doi.org/10.37905/euler.v12i1.24887>

- Damar, M., Küme, T., Yüksel, İ., Çetinkol, A. E., Pal, J. K., & Erenay, F. S. (2024). Medical informatics as a concept and field-based medical informatics research: The case of Turkey. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi*, 26(1), 44–55. <https://doi.org/10.18678/dtfd.1410276>
- Dwipayanti, N. M. U., Lubis, D. S., & Harjana, N. P. A. (2021). Public perception and hand hygiene behavior during COVID-19 pandemic in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 9, 621800. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.621800>
- Falcão, I. R., Tedde, J. G. G., Paixao, E., Cerqueira-Silva, T., Rocha, A. dos S., Fiaccone, R. L., Silva, N. J., de Mello e Silva, J. F., Ichihara, M. Y., Pescarini, J. M., Ribeiro-Silva, R. de C., & Barreto, M. L. (2025). Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer and child malnutrition: A nationwide birth cohort study. *BMJ Global Health*, 10(7), e018431. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-018431>
- Fastabiqul Khairat. (2023). Implementation of direct cash assistance funds for excise products on tobacco products (BLT DBHCHT). *Jurnal Jamsostek*, 1(2), 156–178. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.64>
- Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, dana perimbangan, belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(2), 75–84. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073>
- Ghofilah, P. N. N. (2021). Inovasi pelayanan dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Cianjur di masa pandemi COVID-19. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 89–100. <https://doi.org/10.29240/tik.v5i1.2121>
- Hutabarat, A., Lubis, Y. A., & Suharyanto, A. (2024). Analisis kinerja aparaturn pemerintahan dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH) pada masyarakat miskin. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 3(1), 59–67. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v3i1.3736>
- Indra, Tan, & Maryanti. (2022). Dampak partisipasi program kelompok usaha bersama (KUBE) terhadap kesejahteraan penerima program. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.9853>
- Irfan, A. M., & Kusriani, K. (2024). Analisis perbandingan metode naïve bayes dan K-NN dalam penentuan lokasi layanan administrasi BPJS kesehatan di Provinsi Maluku. *Journal Computer Science and Information Systems (J-Cosys)*, 4(2). <https://doi.org/10.53514/jco.v4i2.535>
- Jannani, A., Sael, N., & Benabbou, F. (2024). Artificial intelligence for quality of life study: A systematic literature review. *IEEE Access*, 12, 62059–62088. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3395369>
- Khalik, M. F. M., & Arifin, F. (2023). Klasifikasi indeks kedalaman kemiskinan berbasis machine learning. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(2), 282–290. <https://doi.org/10.26418/jp.v9i2.67492>
- Lutfiah, F., & Sugiharto, S. (2021). Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia: Scoping review. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 1, 1477–1485. <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i1.882>
- Maidah, N. E., Juwita, O., Pandunata, P., Zarkasi, M., Amalia, K. N., & Firmansyah, D. M. (2022). Pengembangan aplikasi berbasis android untuk sistem kesejahteraan sosial terpadu Kabupaten Jember. *TEKIBA: Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 30–32. <https://doi.org/10.36526/tekiba.v2i2.2262>
- Mohd Kassim, M. A., Kamu, A., Pang, N. T. P., & Mun Ho, C. (2025). Sport psychiatry in the Asia-Pacific: Contributions, trends, and future directions. *Sports Psychiatry*. <https://doi.org/10.1024/2674-0052/a000108>

- Ningrum, E. P. (2020). Peningkatan profesionalitas menuju legitimasi praktik humas pemerintah Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.127>
- Nugroho, A. S., & Maretianiandini, S. T. (2023). Impact of the national economic recovery programme implementation on Indonesia gross domestic product growth. *Journal of Global Business and Management Review*, 5(2), 88–97. <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v5i2.8888>
- Pririzki, S. J., Sulitiana, I., & Adriyansyah, A. (2023). Analisis kausalitas antara pendidikan, kemiskinan, dan PDRB menggunakan panel vector autoregression. *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi*, 11(1), 98–110. <https://doi.org/10.34312/euler.v11i1.19504>
- Pujiastuti, I., & Anshori, D. (2022). Peran media online Magdalene.co terhadap persepsi masyarakat pada isu kesehatan mental ibu (perspektif Sara Mills). *KEMBARA: Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 8(2), 317–334. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21419>
- Rachmawati, L., & Suparman, S. (2023). Tren penelitian research and development berbasis pendekatan kontekstual: Analisis bibliometrika dan pemetaan informasi. *JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan Matematika)*, 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.30998/jkpm.v9i1.21208>
- Ramdhani, T., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). The use of WhatsApp social media as reinforcement online learning during the COVID-19 pandemic. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 107–112. <https://doi.org/10.17509/ijomr.v1i1.33789>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rokhmawati, A., & Aziz, M. Z. (2024). Transformasi kebijakan ketenagakerjaan menuju Indonesia emas 2045: Pemanfaatan machine learning dalam analisis risiko pengangguran. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 765–774. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2222>
- Salsabila, H. G., & Suhaedi, D. (2023). Implementasi metode TOPSIS dalam seleksi penerimaan dana bantuan masyarakat. *Jurnal Riset Matematika*, 21–28. <https://doi.org/10.29313/jrm.v3i1.1733>
- Sarjito, A. (2022). Spillover of COVID-19: Impact on national defense. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(3). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i3-09>
- Song, L., Zhang, J., Ma, D., Fan, Y., Lai, R., Tian, W., Zhang, Z., Ju, J., & Xu, H. (2022). A bibliometric and knowledge-map analysis of macrophage polarization in atherosclerosis from 2001 to 2021. *Frontiers in Immunology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.910444>
- Susanto, S. (2022). Menjadi guru inovatif pada masa pandemi: Peningkatan kapasitas guru SD Genius Islamic School Kota Depok. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 275–285. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1889>
- Syarif Mutsanna, A. (2024). Implementation of MSMEs credit providing using the 5C method by PT BPR Bank Bapas 69. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Terapan*, 2(2), 203–210. <https://doi.org/10.20961/meister.v2i2.1698>
- Syukri, M. (2023). Gender policies of the new developmental state: The case of Indonesian new participatory village governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>

- Wang, S., Yu, P., Zhou, X., Yuan, Y., Chen, J., Chen, D., Liang, J., & Xu, L. (2025). Bibliometrics of the current state of application of teletechnology in the rehabilitation of patients with heart and large blood vessel disease. *Frontiers in Medical Technology*, 6. <https://doi.org/10.3389/fmedt.2024.1382316>
- Yusvita, F., Handayani, P., & Nandra, N. S. (2021). Gambaran kualitas hidup pekerja pra lanjut usia dengan sindrom metabolik. *Journal of Natural Sciences*, 2(3), 114–127. <https://doi.org/10.34007/jonas.v2i3.152>